

Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2006). *Membangun desa partisipatif*: Graha Ilmu.
- Artana, I. M. A., Erviantono, T., & Purmaningsih, P. E. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2012/2013 di Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur. *Citizen Charter*, 1(2).
- Astuty, E., & Fanida, E. H. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *publika*, 1(2), 3-4.
- Basuki. (2016). *Metode Penelitian Akuntansi dan Manajemen Berbasis Studi Kasus*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Bintarto, R. (1983). *Interaksi desa-kota dan permasalahannya*: Ghalia Indonesia.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework 1. *European law journal*, 13(4), 447-468.
- BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Dian, H., & Armansyah, M. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan. *Publika: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4(1), 76.
- Ferry, L., Eckersley, P., & Zakaria, Z. (2015). Accountability and transparency in English local government: moving from 'matching parts' to 'awkward couple'? *Financial Accountability & Management*, 31(3), 345-361.
- Hamengku Buwono, X. (2007). *Merajut kembali keindonesiaan kita*: Gramedia Pustaka Utama.
- Haryanto, H. (2007). Akuntansi Sektor Publik. *Akuntansi Sektor Publik*, 1-251.
- Undang-Undang Pemerintah Indonesia tahun 1965 tentang Desapraja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (1965).
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (1979).
- undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (2004).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (2005).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 133 tahun 2014 (2014a).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2014b).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014c).

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 (2016).
- kompas.com. (2018). ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar.
- Metrotvnews.com. (2015). Masih Trial, Temuan Kasus Dana Desa Jangan Dianggap Korupsi
- Moleong, L. J. (1999). Metodologi penelitian. *Bandung: PT. Remaja Rosda Karya*.
- RI, L. A. N. (1999). Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). *Lembaga Administarsi Negara RI, Jakarta*.
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Administrasi Negara*(ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id), 120.
- Riyanto, Y. (1996). Metodologi Penelitian suatu Tindakan Dasar. *Surabaya: Sie Surabaya*.
- Soetardjo, K. (1984). *Desa. Balai Pustaka, Jakarta*.
- Sopanah, A., Sudarma, M., Ludigdo, U., & Djamhuri, A. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penganggaran Daerah Berbasis Kearifan Lokal (Studi pada Masyarakat Suku Tengger Pengunungan Bromo Jawa Timur). *Simposium Nasional Akuntansi (SNA), 16*.
- Sunardjo, U. (1984). Pemerintahan Desa dan Kelurahan. *Bandung Tarsito*.
- Sutopo, H. B. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar teori dan terapannya dalam penelitian: Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Syamsi, S. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(publikasi.unitri.ac.id), 22.
- Tahir, A. (2014). Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. *PATEN*, 8(89).
- Tahir, M. I. (2012). Sejarah Perkembangan Desa di Indonesia: Desa Masa Lalu, Masa Kini dan Bagaimana Masa depannya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 38.
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Journal Politico*(ejournal.unsrat.ac.id), 3.
- Yaumi, M., & Damopolii, M. (2014). Action research: teori, model, dan aplikasi: Kencana Prenada Media Group.
- Yin, R. K. (2017). *Case study research and applications: Design and methods*: Sage publications.
- Yuliati, Y., & Purnomo, M. (2003). *Sosiologi Pedesaan*: Lappera Pustaka Utama.